

**TESIS**

**PENGARUH KUALITAS AUDIT INTERNAL DAN  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect Of Internal Audit and Human Resources Competence on  
the Quality of Financial Reports in the Government of  
North Toraja Regency*

**MARLIN PALAYUKAN  
A042191036**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**PENGARUH KUALITAS AUDIT INTERNAL DAN  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect Of Internal Audit and Human Resources Competence on  
the Quality of Financial Reports in the Government of  
North Toraja Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**MARLIN PALAYUKAN**

**A042191036**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# TESIS

## **PENGARUH KUALITAS AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

disusun dan diajukan oleh

**MARLIN PALAYUKAN  
A042191036**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

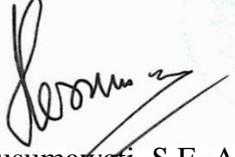
Pada tanggal 12 Agustus 2021

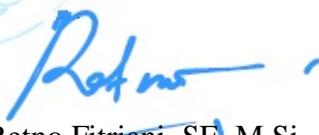
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

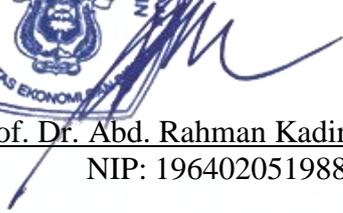
  
Dr. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIP: 196604051992032000

  
Dr. Retno Fitriani, SE., M.Si.  
NIP. 197709132002122000

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP: 197106192000031001

  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP: 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marlin Palayukan

NIM : A042191036

Program Studi : Manajemen Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

PENGARUH KUALITAS AUDIT INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sangsi atas perubahan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003 , pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



**Marlin Palayukan**

A042191036

## **PRAKATA**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Dr. Andi Kusumawati, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Dr. Retno Fitriani, SE.,M.Si. Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, (Bupati Toraja Utara 2016-2021) dan Yohanis Bassang SE, M.Si (Bupati Toraja Utara sekarang) yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan

dan penyelesaian tesis ini.

6. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

**MARLIN PALAYUKAN**

## ABSTRAK

**MARLIN PALAYUKAN.** *Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Andi Kusumawati dan Retno Fitrianti).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh audit internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.

Data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terhadap 40 orang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan terhadap audit internal dapat memengaruhi kenaikan kualitas LKPD secara langsung maupun melalui komitmen organisasi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan terhadap audit internal dapat memengaruhi kenaikan kualitas LKPD secara langsung maupun melalui komitmen organisasi.

Kata kunci: Audit, Kompetensi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah



## ABSTRACT

**MARLIN PALAYUKAN.** *The Effect of Internal Audit and Human Resource Competence on the Quality of Financial Reports in the Government of North Toraja Regency* (supervised by **Andi Kusumawati** and **Retno Fitrianti**)

This study aims to analyze the effect of internal audit on the quality of local government financial reports (LKPD) both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency and analyze the effect of human resources' competence on the quality of local government financial reports (LKPD) both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency.

The data used were primary data collected using a questionnaire from 40 Civil Servants in Inspectorate Office of North Toraja Regency.

The results of the study indicate that internal audit affects the quality of LKPD both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency. This shows that the increase in internal audit can affect the increase in the quality of LKPD both directly or through organizational commitment. In addition, this study also indicates that the competence of human resources affects the quality of LKPD both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency. This shows that an increase in internal audit can affect the increase in the quality of LKPD both directly or through organizational commitment.

Keywords: audit, competence, financial reports, local government





2.1.4.4	Tanggung Jawab Auditor Internal.....	23
2.1.5	Audit Internal Pemerintah .....	23
2.1.6	Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	25
2.1.7	Komitmen Organisasi .....	26
2.1.8	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	27
2.1.8.1	Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.1.8.2	Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
2.1.8.3	Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	
2.1.8.4	Definsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	
2.1.8.5	Definsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	
2.1.8.6	Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan.....	
2.2	Penelitian Terdahulu .....	37
2.3	Kerangka Konseptual .....	40
2.4	Hipotesis.....	41
2.4.1	Pengaruh Kualitas Audit Internal terhadap LKPD Secara Langsung dan Tidak Langsung .....	
2.4.2	Pengaruh Kompetensi SDM terhadap LKPD Secara Langsung dan Tidak Langsung .....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	45
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	45
3.5	Metode Analisis.....	46
3.5.1	Uji Instrument Penelitian .....	46
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	47
3.5.3	Analisi Jalur ( <i>path analysis</i> ).....	48

3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	51
3.5.5	Koefisien Determinasi ( <i>adjusted R<sup>2</sup></i> ). .....	52
3.6	Definisi Operasional .....	53
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
4.1	Analisis Hasil Penelitian .....	59
4.1.1	Karakter Responden .....	60
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian .....	64
4.1.2.1	Audit Internal ( $X_1$ ) .....	64
4.1.2.2	Kompetensi ( $X_2$ ).....	66
4.1.2.3	Komitmen Organisasi ( $Y_1$ ).....	67
4.1.2.4	Kualitas Laporan Keuangan ( $Y_2$ ) .....	69
4.1.3	Hasil Keabsahan Data.....	71
4.1.3.1	Uji Validitas .....	71
4.1.3.2	Uji Reliabilitas.....	72
4.1.4	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	74
4.1.5	Uji Hipotesis .....	83
4.1.5.1	Uji t.....	83
4.1.5.2	Uji F.....	85
4.2	Pembahasan.....	88
4.2.1	Audit Internal terhadap Komitmen Organisasi.....	88
4.2.2	Kompetensi terhadap Komitmen Organisasi .....	90
4.2.3	Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	91
4.2.4	Audit internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	93
4.2.5	Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	95
4.2.6	Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Komitmen Organisasi .....	98
4.2.7	Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Komitmen Organisasi .....	99

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
5.1. Simpulan.....	101
5.2. Saran.....	101
5.3. Keterbatasan Peneliti.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Hasil Audit BPK Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2019 .....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Penelitian .....	53
Tabel 3.2 Scoring Untuk Jawaban Kuesioner .....	58
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	61
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	62
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	63
Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Audit Internal .....	65
Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Kompetensi .....	66
Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Komitmen Organisasi .....	68
Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Kualitas Laporan Keuangan .....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas .....	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas .....	73
Tabel 4.11 Analisis Jalur (Persamaan Y1) .....	74
Tabel 4.12 Analisis Jalur (Persamaan Y2) .....	75
Tabel 4.13 Model Summary Persamaan Y2 .....	76
Tabel 4.14 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung .....	80
Tabel 4.15 Uji Sobel .....	81
Tabel 4.16 Hasil Uji t ( <i>Coefficient</i> Jalur I) .....	83
Tabel 4.17 Hasil Uji t ( <i>Coefficient</i> Jalur II) .....	84
Tabel 4.18 ANOVA (Jalur II) .....	86
Tabel 4.19 Uji Beta .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual .....	40
Gambar 4.1 Pengaruh Langsung antar Variable .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan suatu daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami sejumlah perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak

daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Kaihatu, 2006) Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Menurut Halim (2012:20), keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan yang akuntansi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, hal ini didukung oleh teori stewardship (*stewardship theory*). Teori stewardship menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen dan kesuksesan perusahaan, jika kesuksesan perusahaan tercapai maka hal itu meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Selain itu, kesuksesan pemerintah/organisasi juga akan ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan kepuasan manajemen dengan

memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Mahmudi (2016:2) menyatakan bahwa salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka peningkatan perekonomian suatu daerah, salah satu yang harus dicapai adalah kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan. (Apridianti, 2017).

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Namun, kinerja keuangan pemerintah daerah masih dipandang rendah, hal ini senada dengan yang dikatakan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota regional III di Gedung JEC, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin 6 Februari 2017. Penyerahan LHE AKIP Regional III Indonesia, terdiri dari 156 kabupaten/kota se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Dari 156

kabupaten/kota tersebut tidak ada Kabupaten/kota yang mendapatkan nilai memuaskan atau AA. Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, keseriusan dan komitmen Bupati, Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta pimpinan daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

Sangat penting melakukan pengukuran kinerja keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika melakukan pengelolaan keuangan daerah, Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan dalam menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan, yaitu untuk kepentingan publik, efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2012).

Rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia masih menjadi perhatian dikalangan akademisi dan praktisi. Udayanti dan Ariyanto (2014) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), buruknya sistem pengendalian intern serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf menentukan kualitas LKPD. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester II tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan lemahnya sistem pengendalian intern. Terdapat 100 kasus kelemahan sistem pengendalian intern Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan beberapa masalah antara lain pencatatan belum akurat (46 kasus), Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak lengkap (18 kasus) dan lain-lain kelemahan SPI (36 kasus).

Otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian LKPD (Cherina, 2018). Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi terhadap manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Upaya pemerintah untuk mengetahui apakah LKPD yang disajikan telah diungkapkan dengan wajar dan berkualitas, setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK kemudian mengeluarkan opini yang merupakan hasil penilaian atas kualitas LKPD. Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tertinggi yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan berkualitas adalah opini WTP. Opini WTP terhadap laporan keuangan dapat menaikkan tingkat keyakinan yang tinggi untuk mempercayai informasi LKPD.

Pentingnya Audit Internal dalam suatu instansi membuat timbulnya hal-hal yang harus dilakukan oleh Audit Internal. Audit internal pun harus bebas dari hambatan dalam menjalankan tugasnya. Tugas dari audit internal adalah untuk membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal perusahaan, termasuk pengendalian atas penjualan, membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab, dan pendapat yang objektif mengenai kegiatan yang telah diperiksa. The institute of international auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

*“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”.* (IIA (the Institute of Internal Audit ,1999).

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak maupun dalam pelaksanaan audit.

(Sukrisno Agoes,2013:203) menjelaskan bahwa audit internal adalah: “Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain”. Fungsi Audit Internal di Pemerintah Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP. APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Ratmono (2019), kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber daya yang berkompeten mampu memahami logika akuntansi yang ada, dan bisa lebih efisien dan efektif dalam menyusun laporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten diperlukan guna melaksanakan pengelolaan yang baik, memiliki pengalaman dalam bidang keuangan serta sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Menurut (Ratmono, 2019), kurangnya kompetensi sumber daya manusia

mempengaruhi relevansi laporan keuangan yang dihasilkan. (Azhar, 2010) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Komitmen organisasi (*organization commitment*) juga menentukan kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyalurkan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi. Menurut (Anggriawan dan Yudianto, 2018) komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi dan rasa kesetiaan kepada organisasi. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, khususnya Inspektorat Kab/Kota saat ini adalah Mereviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati /walikota kepada

pihak-pihak sebagaimana diatur pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari Inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Toraja Utara kembali memperoleh predikat opini WTP dari BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan (lihat Rakyatku News, 2019). Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara secara konsisten selama empat (4) tahun berturut-turut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya seperti (Ratmono, 2019; Tambingon dkk., 2018; Anggriawan dan Yudianto, 2018; Sudiarianti, 2015), Ristra Utami Budiyanto (2019) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD salah satunya yaitu sistem pengendalian audit intern.

**Tabel 1.1**  
**Hasil audit BPK Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Opini
1	2016	wajar tanpa pengecualian (WTP)
2	2017	wajar tanpa pengecualian (WTP)
3	2018	wajar tanpa pengecualian (WTP)
4	2019	wajar tanpa pengecualian(WTP)

Sumber: <http://bpk.go.id>

Dari fenomena-fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Toraja Utara medapat opini wajar tanpa pengecualian menurut BPK. Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan

masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Maka, peranan audit internal sangat penting.

Fenomena masih tingginya tingkat temuan oleh BPK sebagai auditor eksternal namun tidak ditemukan oleh APIP sebagai auditor internal menjadi alasan penelitian ini penting dilakukan, banyaknya kasus hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi yang menyeret dan melibatkan pejabat pemerintah daerah yang mengindikasikan masih lemahnya pengawasan APIP, masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP dan pentingnya peran APIP dalam hal ini auditor pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Sisa temuan yang tidak tertindak lanjuti karena adanya proses yg panjang seperti temuan keuangan contoh hibah bansos ataupun temuan administrasi seperti tidak terselesaikan sertifikat tanah-tanah pemerintah yang sudah dibebaskan. Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang baru berkembang sehingga tingkat penguasaan pengetahuan auditor dalam menggali temuan masih tergolong lemah, dibandingkan auditor di daerah lain yg lebih berpengalaman.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Kualitas Internal Audit yang dilakukan akan berhubungan dengan kompetensi dan obyektivitas dari staf Internal Audit pada perusahaan tersebut. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan

yang efektif dengan biaya yang wajar (Hiro Tugiman, 1997), beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan Pengaruh Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Teguh Erawati, 2019) yang berjudul “pengaruh peran internal audit, pemahaman tentang PP no 71 tahun 2010, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan” hasil penelitian tersebut audit internal, pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, terdapat pada objek penelitiannya dan penelitian ini menambahkan variable sumber daya manusia, alasan peneliti menambahkan variabel sumber daya manusia dan menggunakan variabel komitmen organisasi sebagai variabel intervening kemudian melakukan replikasi karena peneliti merasa itu penting dilakukan di pemerintahan Kabupaten Toraja Utara dan untuk memastikan bahwa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu konsisten. Penelitian sebelumnya dilakukan pada pemerintah daerah Yogyakarta, Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan permasalahan diatas. Maka, penulis ingin melakukan penelitian dengan tema **PENGARUH KUALITAS AUDIT INTERNAL, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk

1. Untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.?
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberika masukan mengenai penyusunan laporan keuangan dan memenuhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1. 2.1.1 Teori *Stewardship***

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*) Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu *Stewardship Theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Memaksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan

memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Dalam konteks ini, publik sebagai pelaku adalah masyarakat umum yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Berdasarkan prinsip ini, Undang-Undang kemudian mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD sebagai representasi publik. Pola atau model manajemen akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan pola dalam teori keagenan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah agen rakyat melalui perwakilan di DPR atau DPRD.

Dalam penelitian ini Inspektorat Kabupaten merupakan steward (pengurus) yang dipandang sebagai pihak yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik (masyarakat) terutama stakeholder, dengan begitu predikat *good governance* akan mudah tercapai. Teori ini juga mengemukakan bahwa peran auditor internal bukanlah sekedar untuk menilai kesesuaian laporan keuangan melalui bukti pendukung, tetapi juga berperan dalam memberi saran kepada auditee (subjek yang diaudit) sebagai shareholder. Saran tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Instansi/dinas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber daya di pemerintah daerah tersebut.

### **2.1.2. Sumber Daya Manusia**

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi

ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

### **2.1.3 Teori Kelembagaan**

Selain menggunakan teori Stewardship seperti yang dijelaskan di atas, penelitian ini juga mengacu pada teori kelembagaan. Teori kelembagaan didasarkan pada gagasan (DiMaggio dan Powell, 1983) bahwa suatu organisasi (dalam hal ini entitas pemerintahan) dibentuk oleh konteks kelembagaan di sekitarnya. Pikiran atau ide yang berpengaruh dilembagakan dan kemudian disahkan secara hukum dan

diterima sebagai metode dalam mengoperasikan organisasi. Proses dari legitimasi dilakukan oleh organisasi karena tekanan lingkungan kelembagaan.

(DiMaggio & Powell, 1983) berpendapat bahwa suatu organisasi terbentuk karena adanya kekuatan dari luar organisasi melalui proses imitasi atau kepatuhan. Organisasi akan berusaha untuk menyesuaikan diri atau disebut isomorfisme (proses menyesuaikan) karena tekanan eksternal. Isomorfisme ini juga dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga proses bagaimana suatu organisasi melakukan isomorfisme menurut (DiMaggio dan Powell, 1983) termasuk paksaan, imitasi dan normatif. Variabel penentu kualitas laporan keuangan seperti kepatuhan terhadap keuangan, peraturan manajemen, pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan informasi teknologi adalah bentuk isomorfisme.

#### **2.1.4 Audit Internal**

##### **2.1.4.1. Pengertian Audit Internal**

Audit internal hanya terdapat pada organisasi yang relatif besar. Dalam organisasi ini pimpinan membentuk banyak departemen. Bagian, seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagai wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Definisi mengenai Audit Internal menurut Hery (2017:238) sebagai berikut: “Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu

organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”.

Menurut The Institute of Internal Auditors (2017: 29) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, menyatakan bahwa: *“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization”*. (Audit Internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi). Menurut Sukrisno Agoes (2013-203) pengertian audit Internal sebagai berikut: “Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”. Adapun pengertian audit internal menurut Mulyadi (2010:221) audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut”. Menurut Amin (2012:136) audit internal adalah, jaminan independen objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, membantu organisasi dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi untuk menilai suatu organisasi serta menjamin pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran kegiatan-kegiatan di perusahaan dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak yang bersangkutan.

#### **2.1.4.2. Fungsi Audit Internal dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan. Namun sejalan dengan meningkatnya sistem, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan informasi akuntansi semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.

- b. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Penulis sampai pada pemahaman bahwa fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa sarana atau rekomendasi dan member nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Menurut (Mulyadi,2010: 212), Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. Mereviu keandalan (reliabilitas dan integritas)
3. Mereviu berbagai sistem yang telah ditetapkan
4. Mereviu berbagai cara yang dipergunakan
5. Mereviu berbagai operasi atau program.

Adapun penjelasan dari ruang lingkup audit internal di atas adalah:

1. Mereviu keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereviu berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereviu berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Mereviu berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

#### **2.1.4.3 Tujuan Audit Internal**

Menurut (Sukrisno Agoes ,2013:205) tujuan audit internal menyatakan bahwa: “Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan.”

Menurut (Alfred F. Kaunang, 2013, 5), terdapat 2 (dua) tujuan atau sasaran dilakukannya aktivitas audit internal, yaitu:

1. Penilaian yang independen dan rekomendasi kepada manajemen.
2. Melayani kepentingan manajemen.

Penjelasan lebih dalam terkait dua hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran atau tujuan secara menyeluruh dari internal audit department (departemen audit internal ) adalah memberikan penilaian yang idependen (tidak memihak) atas catatan-catatan akuntansi, keuangan, dan segala aktivitas di dalam suatu perusahaan atau grup dari perusahaan dan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan.
2. Memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa tugas bahwa internal audit department adalah untuk melayani kepentingan manajemen.

Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit internal dituntut oleh untuk:

- a. Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada manajemen.
- b. Produktif dalam membuat dan memberikan rekomendasi/laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional dan keuangan.
- c. Menjadi perpanjangan tangan manajemen dalam hal pengawasan (control).
- d. Pimpinan dan dewan pengawasan organisasi harus memahami dengan jelas

Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tujuan, tugas, dan tanggung jawab dari audit internal, maka akan mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otoritas tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

#### **2.1.4.4 Tanggung Jawab Auditor Internal**

Tanggung jawab auditor internal dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok permasalahan.

Menurut (Amin Widjaja Tunggal 2012: 21), tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan”.

Pada dasarnya tanggung jawab audit internal adalah membantu anggota perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan peninjauan ulang atas informasi-informasi yang saling berhubungan. Kewenangan dan tanggung jawab auditor internal harus dinyatakan dengan dokumen tertulis yang formal dalam anggaran dasar organisasi dengan mendapat persetujuan dari manajemen senior.

#### **2.1.5. Audit Internal Pemerintah**

Auditor internal dalam suatu instansi berfungsi menilai apakah sistem pengawasan internal yang telah ditetapkan berjalan dengan akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi audit internal di pemerintahan Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya di sebut APIP. APIP adalah aparat

yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah, lingkup kegiatan intenal yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan, sebagai berikut:

1. Kegiatan penjamin kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
  - a. Audit:
  - b. Audit Keuangan
    - a) Audit keuangan yang diberikan opini.
    - b) Audit terhadap aspek keuangan tertentu
  - c. Audit kinerja
  - d. Audit dengan tujuan tertentu
  - e. Evaluasi
  - f. Reviuw
  - g. Pemuatan/monitoring
2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan kualitas (kegiatan consulting), antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Standar audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap aspek keuangan tertentu, Audit kinerja, Audit dengan tujuan tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, serta Pemberian jasa konsultan (*consulting activities*).

### **2.1.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut (Zuliatri, 2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusun laporan keuangan yang berkualitas.

(Azhar, 2010) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi,

sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

(Hutapea dan Nurianna ,2008) mengemukakan standar kompetensi mencakup tiga aspek yang selanjutnya menjadi indikator kompetensi yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*knowledge*), yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu mengetahui dan memahami pengetahuan dibidangna masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab, mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur dan teknik.
2. Keterampilan (*skills*), kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan maupun secara lisan,
3. Sikap (*attitude*), memiliki kemampuan dalam berkeaktivitas dalam bekerja, semangat kerja yang tinggi dan memiliki kemampuan dalam perencanaan.

Kompetensi merupakan *knowledge*, *skill*, dan *attitude* cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

#### **2.1.7. Komitmen Organisasi**

Akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan faktor penting dalam pelayanan publik. Akuntabilitas keuangan merupakan penyediaan informasi dan pengungkapan tentang kegiatan atau kinerja keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hak publik adalah hak untuk tahu, hak untuk mendapat informasi dan

hak untuk didengar. Komitmen organisasi menunjukkan kekuatan individu dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam bagian organisasi (Mowday dkk., 1989). (Meyer dkk., 1997) menyajikan tiga komponen komitmen organisasi antara lain komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. Ketiga komponen tersebut menggambarkan tekad individu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Komitmen terhadap tujuan anggaran dalam organisasi didefinisikan sebagai tekad untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan dilakukan secara berkelanjutan (lihat Locke dan Latham, 1990). Definisi ini digunakan oleh penelitian sebelumnya seperti (Maiga dan Jacob, 2005) untuk menggambarkan pentingnya variabel komitmen organisasi dalam pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja individu ditentukan oleh komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai. Menurut (Locke dkk., 1988) komitmen organisasi dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain (1) faktor eksternal yang terdiri dari otoritas, faktor teman sebaya, dan penghargaan eksternal, (2) Faktor interaktif yang terdiri dari partisipasi dan persaingan dan (3) faktor internal yang terdiri dari harapan dan penghargaan internal.

## **2.1.8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.8.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.” Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan: “Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

#### **2.1.8.2. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.

3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 35 ketentuan peraturan perundangundangan (*statutory reports*).

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundangundangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

#### **2.1.8.3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Tujuan umum laporan keuangan

adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 secara spesifik menguraikan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mencapai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau deficit, laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan kas suatu entitas pelaporan. Dengan adanya penjelasan dari PP No 71 tahun 2010 yang menyatakan: “Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.”

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen

laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauh mana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut. Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

#### **2.1.8.4. Definsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Pengertian kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah Menurut Indra Bastian (2010:9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.” Suatu Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik antara lain relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (lihat Ratmono dan Sutrisno, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

#### **2.1.8.5. Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan, dan
4. Dapat dipahami.

Berikut penjelasan dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas adalah:

## 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian uang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti dan tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem informasi Keuangan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu	Berdasarkan hasil penelitian, Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya peran internal audit pemerintah daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan melakukan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, auditor internal telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2	Rizki Septidiany (2014)	Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Audit Internal dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Secara parsial Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Audit Internal dan

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3	Lusi Novita Sari (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Secara simultan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4	Lilis Setyowati dan Wikan Isthika (2014)	“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang”.	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang. Peran internal audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang.
5	Desi Pangalinan (2020)	ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS NORTH	Kompetensi sumber daya manusia atau ASN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Artinya semakin kompeten sumber daya manusia atau ASN dalam mengerjakan tugas dan fungsinya maka kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara akan semakin baik.
6	Tambingon	faktor-faktor yang	Hasil penelitian

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	dkk., (2018)	mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	menunjukkan bahwa komitmen organisasi, independensi audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
7	Yosefrinaldi (2013)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	Akhdad Syarifudin (2014)	“Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris	Peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap SPIP. SPIP dapat memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD. SPIP tidak

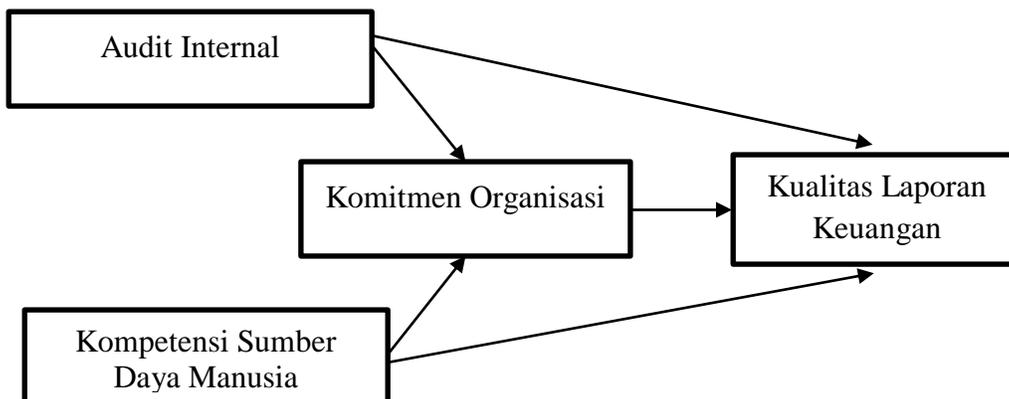
No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		pada Pemkab Kebumen) <sup>7</sup> .	memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas LKPD.

Sumber: Penelitian terdahulu, 2020[

### 2.3. Kerangka Konseptual

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



## **2.4. Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Kualitas Audit Internal terhadap LKPD Secara Langsung dan Tidak Langsung**

Audit internal adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan atau jaminan yang independen dan objektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.

(Nainggolan, 2011) menyatakan GCG mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dianggap berhasil jika mereka dapat mempertahankan hidup, memperoleh laba dan berkembang. Untuk dapat melaksanakan ketiga cara tersebut, perusahaan harus melakukan monitoring secara kontinyu, yang dilakukan oleh audit internal sehingga harapan untuk memuaskan bagi semua kelompok yang berkepentingan dengan perusahaan dapat terwujud. Dalam penelitian ini juga menduga bahwa komitmen organisasi dapat memediasi hubungan antara audit internal terhadap LKPD, Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Octarina Elizabet Manullang (2016) yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating dan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen organisasi sebagai variabel

moderating dapat memoderasi hubungan antara implementasi standar akuntansi pemerintahan, audit intern, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Diduga audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.

#### **2.4.2. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap LKPD Secara Langsung dan Tidak Langsung**

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Ratmono (2019), kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber daya yang berkompeten mampu memahami logika akuntansi yang ada, dan bisa lebih efisien dan efektif dalam menyusun laporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten diperlukan guna melaksanakan pengelolaan yang baik, memiliki pengalaman dalam bidang keuangan serta sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Menurut (Ratmono, 2019), kurangnya kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi relevansi laporan keuangan yang dihasilkan. (Azhar ,2010) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis 2 : Diduga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.